

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Fernando M Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007).

Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

M. Khosim, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan The Legal Sistem, a Sosial Science Perspektif dari Law-Lawrence M Friedman*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Sujamto, *Daerah istimewa dalam kesatuan Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Jurnal Nasional:

JT. Pareke, “Reforma Agraria: Membangun Ulang Relasi Negara dan Masyarakat Adat Melalui Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat”, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol. 5, No.1, 2020, DOI:[10.29300/imr.v5i1.2915](https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2915).

Rikardo Simarmata, “Penjelasan Konsep-konsep Kunci Terkait Masyarakat Hukum Adat”, *Academia.edu*, 2021, DOI: <https://www.academia.edu/31316372>.

Suparjo Sujadi “Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)”, *Journal Hukum Lingkungan*, Vol.4, 2 Febuari 2018, DOI:[10.38011/jhli.v4i2.68](https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68).

Yotam Senis “Dampak Proses Resettlement Area Vilages Terhadap Perubahan Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Hasanuddin Journal of Sociology*, Vol. 3, No.1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.31947/hjs.vi.12050>.

Hasil Penelitian:

BP Tangguh, “Laporan Pelepasan Tanah Ulayat yang dilakukan oleh BP Tangguh atas Land Acquisition and Resettlement Plant suku Sumuri di Kampung

Tanah Merah Kab. Teluk Bintuni. Laporan Penyelesaian Pelepasan Tanah Ulayat: Jakarta: BP Tangguh, 2009.

Genting Oil Kasuri Pte Ltd, “Laporan Pengembangan Wilayah Kerja Blok Kasuri (*Plan of Development* -POD) I, di Kampung Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat”. Laporan Pengembangan: Jakarta: Genting Oil Kasuri Pte Ltd, 2018.

Genting Oil Kasuri Pte Ltd, “Pemetaan sosial, ekonomi dan budaya suku Adat Sumuri atas kebutuhan tanah seluas 425 hektar”. Laporan Pemetaan Sosial: Jakarta: Genting Oil Kasuri Pte Ltd, 2020.

Genting Oil Kasuri Pte Ltd, “Profil Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan Social Network Analysis masyarakat suku Sumuri”. Laporan Kapasitas Tata Kelola: Jakarta: Genting Oil Kasuri Pte Ltd, 2020.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, “Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. Penelitian Komnas HAM: Jakarta: Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat dalam kawasan tertentu.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatan Untuk Pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Putusan:

Tap MPR Nomor III/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

Putusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PNS).

Putusan Menterian Koordinator Bidang Perekonomian No.21 Tahun 2022, tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PNS).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak dan dapat dibebani kewajiban. Keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap

hukum adat sebagai living law yang sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 membatalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) karena pemberian HP3 akan potensial mengancam posisi masyarakat adat dan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya secara turun-temurun dari sumber daya yang ada pada perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Web:

KPPIP, “Kawasan Industri Teluk Bintuni Papua Barat”, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-industri-teluk-bintuni-papua-barat/>.

Laporan “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023” yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478331_kem_ppkf_2023.

